

ANALISIS POTENSI INDIKATIF SDM CALON TRANSMIGRAN DIKAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

Kurniawaty Fitri dan Ahmad Rifqi

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

UU No. 15/1997 as it were has been changed by UU No.29 about “ Ketrasmigrasian” declares for that resettlement is done through development approach and Independent Integrated City (KTM) development.

This research intent to map SDM’s indication local transmigrants candidate as allocation, spread home and economic social characteristic and cultural appropriate qualification who is presupposed and formulas society aspiration about acceptance to resettlement program and cultural economic social characteristic prospective of transmigrants population of origin (TPA).

Result observationing show that economic development, social and culture needs to be done by development in education, health, service and small industry, artistry and sport.

Then, population based its spread as objective and SDM’s potency transmigrants candidate is at Cingam village, Makeruh village, Hutan Panjang village, Titi Akar and Pangkalan Nyirih village as center of KTM development.

Society acceptance to this resettlement program is pro and contra happening because reducing accepted information. Finally, requested transmigrant composition society is 60 % from local people and 40 % transmigrants population of origin (TPA), more preferred transmigrants that indigenou tribal Javaness.

Keyword: Independent Integrated City (KTM), Transmigrants, Rupert Island

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, bahwa pembangunan transmigrasi pada saat ini lebih menekankan pendekatan pembangunan berbasis kawasan, dimana penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui pendekatan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 214 tentang pedoman pembangunan pengembangan Kota Terpadu Mandiri di kawasan transmigrasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Memetakan indikasi potensi SDM calon transmigran penduduk setempat, berupa alokasi (jumlah), sebaran tempat tinggal, dan karakteristik sosekbud sesuai dengan kualifikasi yang persyaratkan.
- b. Merumuskan aspirasi masyarakat tentang penerimaan terhadap program transmigrasi dan karakteristik Sosial Ekonomi dan Budaya (Sosekbud) calon transmigran daerah asal.
- c. Merumuskan rekomendasi rencana pengerahan dan penempatan yang efektif dan efisien, yang meliputi rencana pemberian informasi/ penyuluhan, rencana pendaftaran dan seleksi, kebutuhan pelatihan, pengangkutan dan penempatan transmigrasi.

2. METODOLOGI

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam kajian ini untuk melihat kesiapan masyarakat dalam menerima pengembangan kawasan perencanaan (kawasan KTM) dan juga dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah kawasan KTM adalah melalui proses pengumpulan data primer dan literatur, pengamatan langsung di lapangan, pengumpulan data sekunder dengan cara penyebaran kuisioner, fokus diskusi group serta mengevaluasi sumber daya manusia (SDM) di daerah kawasan KTM.

Data primer meliputi :

- a. Kondisi fisik dan lingkungan wilayah secara langsung melalui kunjungan (observasi) ke semua bagian wilayah
- b. Data karakteristik sosial, ekonomi dan budaya pada keluarga dan individu potensi sasaran kelompok SDM (indikasi) calon transmigran melalui wawancara mendalam
- c. Penjaringan aspirasi pemangku kepentingan masyarakat sekitar calon kawasan transmigrasi yang dapat dilaksanakan melalui fokus grup discussion (FGD) dengan masyarakat sebagai narasumber

Data sekunder meliputi :

- a. Data dan informasi fisik (geografi) aksesibilitas, demografi, pengembangan usaha dan prospek ekonomi.
- b. Data dan informasi Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan Sosial Ekonomi dan Budaya wilayah sasaran pengerahan..

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, struktur komunitas masyarakat di Pulau Rupa masih mempertimbangkan status sosial. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pada umumnya, pegawai negeri/TNI mendapat penghargaan dari masyarakat karena dianggap sangat menentukan dan berjasa dalam kegiatan pemerintah. Pedagang pengumpul (tokeh) juga mendapat penghargaan dari masyarakat karena ia memiliki kekayaan yang berpengaruh dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sedangkan, kepala suku, tokoh agama, dan cerdik cendekia mendapat penghargaan dari masyarakat karena dapat membuat keputusan dan mempengaruhi tatanan hidup yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai jaminan keberlanjutan pelaksanaan pengembangan potensi SDM calon transmigran di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Pulau Rupa, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran serta masyarakat didalam setiap aktivitas pengembangan kawasan, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan (konstruksi) maupun pasca konstruksi serta adanya kebersamaan pengembangan usaha ekonomi oleh SDM calon transmigran.

Disamping itu, data keadaan sosial ekonomi dan budaya menjadi penentu dalam menilai potensi SDM di daerah transmigran sehingga diperlukan untuk melihat sebaran penduduk menurut desa, rata-rata usia, tingkat pendidikan, ketrampilan/ keahlian, status ketenagakerjaan, tingkat pendapatan keluarga, Pemilikan asset, suku/etnis dan Agama. Dengan adanya data tersebut bisa dilihat potensi yang ada dalam masyarakat calon transmigran.

Oleh sebab itu pola pendekatan *bottom up planning* akan lebih tepat, karena akan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, dan tentunya hal ini akan membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya adalah salah satu perangkat pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat turut serta aktif dalam setiap tahap pengembangan kawasan .

Dalam pembentukan kawasan transmigrasi berdasarkan UU.No.29 tahun 2009 menyatakan untuk membangkitkan kinerja masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan sosial dan budaya, dengan mengacu pada UU tersebut. Pengembangan sosial Budaya merupakan potensi untuk mempersatukan calon transmigran yang ada di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), dengan adanya pengembangan budaya terjadi pembauran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Tabel 1 : Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat KTM Pulau Rupa

No	Parameter	Masalah	Pelatihan/Pembentukan	Peserta	Lokasi
1	Sosial Budaya	Pendidikan	Pelatihan Kejar Paket A, B	Masyarakat	Rupa
2		Kesehatan	Pelatihan kader KB dan Pos Yandu	Masyrakat	Rupa
3		Jastri	Pelatihan Jasa dan Industri Kecil	Masyarakat	Rupa
4		Kesenian dan olah raga	Penbentukan Kelompok seni dan kelompok olah raga	Masyarakat	Rupa

Dari survey yang telah dilakukan pada bulan September 2010 pada masing-masing desa maka sasaran dan potensi SDM calon transmigran berada di Desa Cingam, Desa Makeruh, Hutan Panjang dan Titi Akar serta Pangkalan Nyirih sebagai Pusat KTM sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Jumlah Penduduk berdasarkan Desa di Kawasan KTM Pulau Rupa

Desa	Jenis Kelamin		Total	Kepadatan Jiwa/Km ²	Luas (km ²)
	Laki-laki	Perempuan			
Sei Cingam	1.305	1.280	2.585	35,24	73,35
Pangkalan Nyirih	2.468	2.251	4.719	48,65	97,00
Hutan Panjang	1.740	1.583	3.323	45,52	73,00
Makeruh	903	816	1.719	11,38	151,00
Titi Akar	2.730	2.429	5.159	17,20	300,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2010

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan SDM calon Transmigrasi yang berasal dari Transmigrasi penduduk Setempat (TPS) maka diketahui bahwa rata-rata memiliki tingkat pendidikan SD s. d SMP.



Secara sosial budaya masyarakat Di Pulau Rupa terdapat lima suku/etnis yaitu suku Melayu, Jawa, Cina, Batak, Suku Akit, (penduduk yang pertama kali menempati Pulau Rupa). Masing-masing suku tersebut tidak memiliki perbedaan dalam hal kemasyarakatan, dan saling berbaur satu sama lain. Sistem kekerabatan masyarakat masih cukup erat. Budaya gotong royong masyarakat di Pulau Rupa masih ada, di antaranya seperti pada saat membersihkan jalan desa, parit desa, dan sebagainya yang sifatnya untuk kepentingan (fasilitas) umum.

Adat istiadat yang dianut penduduk setempat pada umumnya adalah budaya melayu. Di dalam kehidupan sosialnya, terdapat seorang yang dituakan sebagai kepala adat yang disebut *kebatinan*. Kepala adat mempunyai tugas memimpin upacara-upacara adat seperti perkawinan, sunatan, tindik, dan lain-lain.

Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian baik sebagai petani (karet, sawit dan tebu). Selain itu beberapa penduduk berwirausaha, PNS dan sebagainya. Dilihat dari kondisi perekonomian di Pulau Rupa mengalami defisit dalam hubungan perdagangan dengan luar daerah. Kebutuhan rumah tangga, barang-barang hasil olahan pabrik dan produksi industri sepenuhnya datang dari luar seperti Bengkalis atau Dumai maupun Malaka. Sedangkan hasil bumi Pulau Rupa pada masa lalu adalah kayu hasil tebang sedangkan pada masa ini tinggal getah karet.

Usaha perikanan yang dilakukan masih dalam skala kecil dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, karena terbatasnya daerah operasi nelayan yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan menjadi semakin sedikit sehingga pekerjaan sebagai nelayan pada saat ini tidak dapat diandalkan menjadi mata pencaharian pokok.

Secara konseptual kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal dan dikembangkan dalam pelaksanaan lapangan dalam bentuk pengalaman kerja, dalam kompetensi tersebut, seseorang dapat memperoleh manfaat guna menunjang kesejahteraan atau kehidupannya. Kompetensi seorang petani, adalah seseorang yang ahli dalam mengolah lahan sebagai outputnya. Kompetensi masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan KTM Rupa adalah upaya untuk menghasilkan suatu komoditas produk dari usaha tani, yang memiliki keunggulan. Komoditas dihasilkan sesuai dengan kondisi lahan adalah tanaman pangan sebagai komoditas penunjang, dan karet dan sawit sebagai komoditas utama.

Dengan adanya rencana KTM di Pulau Rupa bisa memberi nuansa baru keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh SDM calon transmigrasi yang berasal dari Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) dan hal ini dapat memotivasi atau berbagi ilmu bagi Transmigran Penduduk Setempat (TPS), dengan adanya pembauran ini maka transmigran Penduduk Setempat bisa melihat dan mencontoh atau mendapatkan ilmu dari Transmigran Penduduk Asal (TPA) karena transmigran dari Penduduk Asal sudah dibekali tentang ilmu bercocok tanam.

Pengalaman dalam pengembangan usaha tani karet dan sawit perlu ditingkatkan, dengan melalui pelatihan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 : Peningkatan Kompetensi Usahatani Masyarakat di KTM Rupa

No	Parameter	Masalah	Pelatihan/Pembentukan	Peserta
1	Kompetensi	Budidaya tanaman pangan	Pengadaan bibit intensifikasi lahan komposisi <i>seedfarm Demplot</i> , <i>testfarm</i> pemberantasan hama pasca panen	Masyarakat
2		Budidaya tanaman perkebunan karet, sawit, tebu	Kemitraan manajemen kebun	Masyarakat
3		Kelembagaan	Kelompok usaha bersama kelompok tani koperasi	Masyarakat

Pola intensifikasi ruang usaha dilakukan dengan mengoptimalkan ruang-ruang ekonomi yang ada saat ini sehingga dapat dicapai ruang usaha yang lebih besar. serta memanfaatkan ruang usaha dengan fungsi yang berbeda pada waktu yang berbeda, dilakukan dengan memanfaatkan:

- Sebagian lahan usaha menerapkan tumpang sari dengan tanaman komoditi unggulan.
- Memanfaatkan lahan sesuai dengan Status Lahannya, Supaya peningkatan jenis usaha ini saling menguntungkan maka dilakukan pengelompokan jenis usaha yang

saling mendukung dan memiliki persamaan. Jenis kegiatan yang akan dikembangkan secara intensif antara lain:

- Perkebunan tebu, karet dan sawit
- Pusat perindustrian
- Pusat perdagangan
- Penginapan/Hotel
- Perbankan
- Wisata *home industry* berbasis hasil pertanian setempat

Selain itu perlu juga dilakukan upaya untuk menjamin kelangsungan usaha kecil dengan cara memberikan bantuan modal usaha, membuka peluang pasar serta pembinaan yang berkesimbangan, adapun kegiatan usaha kecil yang ada di kawasan pengembangan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan *home industry* hasil turunan komoditas durian, pisang.
- Kegiatan *home industry* makanan kering

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan modal usaha didalam kawasan perencanaan secara khusus dilakukan meliputi 2 hal yaitu modal ketrampilan dan modal finansial (dengan tetap memperhatikan modal-modal yang sudah tersedia lainnya).

Peningkatan ketrampilan diutamakan untuk memberikan nilai tambah hasil pertanian menjadi produk-produk baru yang dapat menjadi kekhasan kawasan KTM Rupert. Untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat maka harus dikaitkan dengan visi dan misi pengembangan ruang didalam kawasan perencanaan, sehingga antara sumber daya manusia dan program pengembangan ruang didalam kawasan KTM Rupert dapat saling mendukung, juga tidak menutup kemungkinan bagi pengembangan ketrampilan lain bagi pengembangan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sebagai efek ganda dari pengembangan kawasan perencanaan.

Program pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan suatu model bantuan modal finansial bagi pengembangan usaha kawasan. Selain dari program pemberdayaan masyarakat, bantuan kredit mikro dari lembaga keuangan (bank) juga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan ini. Maka dengan demikian pemberian pinjaman modal usaha selanjutnya diarahkan pada pengembangan usaha yang masih terkait dengan tema pengembangan kawasan perencanaan sebagai pusat agribisnis khususnya komoditas tebu dan kelapa sawit.

Penerimaan masyarakat terhadap program transmigrasi ini terjadi pro dan kontra dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat setempat, sehingga benturan atau konflik akan tetap terjadi. Diantaranya adalah adanya benturan budaya antara penduduk asli dan pendatang. Permasalahan ini adalah permasalahan berat yang tidak mungkin dihindari. Penduduk asli memiliki berbagai sikap terhadap transmigran, ada sikap yang senang menerima pendatang dan ada yang tidak menyukai kedatangan transmigran.

Adanya sengketa tanah yang terjadi antara penduduk asli dan pendatang dan antar sesama transmigran merupakan salah satu masalah lain yang timbul akibat transmigrasi. Beberapa hal yang terkait dengan aspirasi masyarakat terhadap pengembangan kawasan KTM Pulau Rupa adalah sebagai berikut:

- a. Komposisi transmigran yang diminta adalah 60% transmigran lokal dan 40% transmigrasi pendatang
- b. Daerah asal transmigran pendatang yang diminta diharapkan berasal Suku Jawa.

Untuk menghindari adanya ketidakcocokan atau persinggungan karena adanya perbedaan adat kebiasaan dengan penduduk setempat terutama warga transmigran lokal, maka permintaan tersebut di atas dapat dijadikan pertimbangan untuk direalisasikan. Akulturasi budaya antara masyarakat lokal dan pendatang perlu mendapat perhatian dalam upaya mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Kearifan lokal budaya Jawa hampir secara umum memiliki konsep untuk meredam konflik dengan *johtaan* atau *neng-nengan* (tidak bertegur sapa atau pantang berbicara dengan lawan konfliknya)

sedangkan suku melayu memiliki kebijakan lokal bahwa kalau sudah makan bersama, maka tidak ada perseteruan lagi. Kebijakan lokal ini cenderung memberi peringatan kepada orang lain agar tidak mencoba memulai atau melakukan konflik (senada dengan pendapat, jika ingin damai, maka bersiap-siaplah untuk berperang). Perpaduan ini dianggap dapat mempercepat keberhasilan program transmigrasi di wilayah KTM.

Rencana teknis pengerahan calon transmigran di prioritaskan pada lima desa yang ada di Pulau Rupa yaitu Desa Titi Akar, Pangkalan Nyirih, Makeruh, Sei Cingam, dan Hutan Panjang. Semua calon transmigran akan di sebarkan sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah KTM.

Sebagai dasar pertimbangan kesesuaian SDM sasaran dengan pola pengembangan kawasan transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian aspek demografi
- b. Penilaian aspek sosiografi
- c. Penilaian aspek geografi
- d. Penilaian aspek psikografi

Arahan Rencana Pengerahan TPS dan TPA dibagi berdasarkan beberapa criteria yaitu:

a. Komposisi alokasi antara TPS dan TPA

Melihat jumlah kebutuhan tenaga kerja untuk perkebunan tebu dan industry gula pada bagian sebelumnya, terdapat 8.340 kesempatan kerja, diharapkan 60% tenaga kerja berasal dari wilayah KTM.

b. Komposisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

- (i) Keahlian/Keterampilan
- (ii) Komposisi suku / etnis
- (iii) Komposisi agama
- (iv)Penerimaan Penduduk Asal

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa sekitar 60 % dari penduduk dikawasan ini belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan sehingga program KTM ini dapat terlaksana. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi program KTM pada setiap kesempatan kepada masyarakat setempat. Tahapan ini dapat diikuti pula dengan mempersiapkan penduduk setempat untuk menjadi masyarakat kota melalui program pengembangan perilaku (*being*) dan pengembangan keahlian (*doing*). Selanjutnya perlu menempatkan petugas sebagai fasilitator untuk menerapkan suatu manajemen pelayanan masyarakat kota.

Pendaftaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- Pendaftaran Umum adalah kegiatan mencatat keinginan/minat masyarakat untuk berpindah ke WPT/LPT sesuai dengan program pembangunan transmigrasi.
- Pendaftaran Khusus adalah kegiatan mencatat keinginan/minat masyarakat untuk pindah ke WPT/LPT yang telah ditetapkan lokasi permukimannya sesuai dengan hasil kesepakatan/perjanjian kerjasama antar daerah.

Seleksi dapat pula dibagi menjadi 2, yaitu :

- Seleksi Umum adalah kegiatan untuk memilih calon transmigran terhadap pendaftar yang meliputi kelengkapan administrasi kependudukan.
- Seleksi Khusus adalah kegiatan untuk memilih calon transmigran yang memenuhi syarat tertentu sesuai perjanjian kerjasama antar daerah dengan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Rencana Teknis Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran bertujuan untuk memberikan acuan kepada petugas pelaksana di lapangan dalam memberikan pelayanan pendaftaran dan seleksi calon kepada masyarakat yang berminat melakukan perpindahan melalui transmigrasi. Pendaftaran dan Seleksi (pendafsi) Calon Transmigran merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi khususnya dalam rekrutmen calon transmigran yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan.

Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan pengerahan dan perpindahan transmigrasi yaitu adanya transmigran yang meninggalkan lokasi permukiman. Permasalahan tersebut walaupun bukan sepenuhnya disebabkan lemahnya seleksi calon transmigran, juga akibat faktor kesiapan pelayanan di daerah penempatan transmigrasi yang kurang siap. Disamping itu perlu adanya bahan informasi lokasi daerah tujuan sebagai bahan penyuluhan kepada masyarakat calon transmigran. Terhadap calon transmigran yang sudah terdaftar dan terseleksi perlu dituangkan dalam Surat keputusan Bupati/Walikota agar legalitas calon transmigran lebih terjamin untuk siap diberangkatkan ke daerah tujuan. Kelengkapan lainnya yang penting adalah surat kepindahan penduduk termasuk kepindahan sekolah anggota keluarga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antara petugas Kabupaten dan Provinsi pada saat pelaksanaan seleksi calon transmigran.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan modal usaha didalam kawasan perencanaan secara khusus dilakukan dengan tetap memperhatikan modal keterampilan, perlu peningkatan keterampilan masyarakat guna mengembangkan potensi hasil pertanian sehingga dapat memberikan nilai tambah dari hasil-hasil pertanian. Adanya aspirasi dari masyarakat setempat yang menginginkan 60 % TPS membawa pengaruh yang cukup signifikan karena biasanya TPS memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga ini akan berpengaruh kepada lambatnya dalam menyerap inovasi. Sementara sebagai transmigran di KTM dituntut untuk dapat menguasai Iptek, menguasai informasi pasar dan sebagainya. Guna meningkatkan kompetensi transmigran dalam kaitannya dengan produktivitas dilokasi/kawasan transmigrasi maka kebijakan yang perlu diambil adalah program pelatihan bagi calon transmigran atau transmigran yang bernuansa latihan berbasis kompetensi kerja.

Corak pembelajaran yang dilakukan harus aktif dan dialogis secara kelompok/tim. Jenis pelatihan yang dibutuhkan dilokasi transmigrasi adalah pelatihan Panca usaha tani yang meliputi:

- a. Pelatihan Pancausaha tani dan pasca panen
- b. Pelatihan Konversi lahan

- c. Pelatihan teknik pembibitan
- d. Pelatihan Pengendalian hama dan penyakit tanaman
- e. Pelatihan Manajemen usaha tani

Selanjutnya perlu disusun kurikulum pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan tersebut, dimana bahan ajar dikemas dalam bentuk modul yang diperuntukkan bagi pendidikan orang dewasa dan memungkinkan peserta berperan aktif dalam setiap kegiatan. Isi modul memuat petunjuk dan arahan yang sistematis kepada pengajar tentang bagaimana cara/teknik pengalihan pengetahuan dan keterampilan kepada transmigran

Untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan transmigran agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat mandiri. Pemberian bantuan peralatan perbekalan meliputi alat tidur, alat dapur, alat penerangan dan alat pertanian / pertukangan dengan jenis dan kebutuhan sesuai pola usaha yang dikembangkan serta kondisi daerah setempat.

Arahan rencana teknis penempatan transmigran dapat dilihat dari *master plan* atau peta orientasi penempatan dikawasan KTM, dengan adanya peta ini bisa memudahkan bagi panitia atau pihak yang berwenang dalam pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dalam memberikan arahan dan konsolidasi dengan pihak desa atau pihak terkait lainnya. Selain itu komposisi penempatan penduduk bisa di ketahui berapa KK untuk satu desa berdasarkan luas lahan.

Berdasarkan permintaan dari penduduk setempat dan survey di lapangan yang telah dilakukan maka calon transmigrasi yang diminati adalah yang berasal dari Pulau Jawa dan komposisi penempatan transmigrasi Penduduk asal sebesar 60% transmigran lokal dan 40% transmigran asal atau yang telah membuat kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Asal dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan transmigrasi lokal adalah warga desa setempat dan warga desa tetangga. Perhitungan biaya pengerahan dan penempatan adalah 1 KK terdiri dari 4 orang.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Dalam pengembangan dibidang ekonomi, sosial dan budaya perlu dilakukan pengembangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, jasa dan industry kecil, kesenian dan olahraga yang meliputi pemberian pelatihan kejar paket A dan B, pelatihan kader KB dan Posyandu, pelatihan bidang jasa dan industry kecil serta pembentukan kelompok seni dan olahraga.
- b. Penduduk berdasarkan sebarannya sebagai sasaran dan potensi SDM calon transmigran berada didesa Cingam, desa Makeruh, desa Hutan Panjang, desa Titi Akar dan desa Pangkalan Nyirih sebagai pusat pengembangan KTM.
- c. Penerimaan masyarakat terhadap program transmigrasi ini terjadi pro dan kontra dikarenakan kurangnya informasi yang diterima masyarakat sehingga akan ada sedikit konflik ditengah masyarakat.
- d. Komposisi transmigran yang diminta masyarakat adalah sebesar 60 % dari jumlah transmigran local dan 40 % transmigran pendatang. Untuk menghindari perselisihan dan ketidakcocokan antara transmigran penduduk setempat dan transmigran penduduk asal maka diharapkan transmigran penduduk asal merupakan suku Jawa

Rekomendasi

- a. Berdasarkan alokasi dan kualitas / keahlian calon TPS yang memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah sehingga ini akan berpengaruh kepada lambatnya dalam menyerap inovasi sehingga perlu diberikan beberapa program pelatihan baik sebelum keberangkatan maupun setelah sampai dikawasan permukiman transmigran
- b. Perlu mempersiapkan penduduk untuk menjadi masyarakat kota melalui program pengembangan perilaku (*being*) dan pengembangan keahlian (*doing*).
- c. Perlu menempatkan petugas sebagai fasilitator untuk menerapkan suatu manajemen pelayanan masyarakat kota.
- d. Guna meningkatkan kompetensi transmigran dalam kaitannya dengan produktivitas dilokasi/kawasan transmigrasi maka kebijakan yang perlu diambil adalah program pelatihan bagi calon transmigran atau transmigran yang bernuansa latihan berbasis kompetensi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Bina Perpindahan Transmigrasi**, Standar Bantuan Peralatan dan Perbekalan Transmigran, Direktorat Bina Perpindahan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2002
- Departemen Transmigrasi**, Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pengembangan sapi potong, [http:// Paternakan.Litbang.Deptan.go.id/Index.Php](http://Paternakan.Litbang.Deptan.go.id/Index.Php), tanggal download 23 Oktober 2010
- Harry**, Pulau Luar yang Terpinggirkan, <http://negeribadri./blogdetik.com/2010/02/03/pulau-pulau-luayangterpinggirkan,htm>, tanggal download 03 September 2010
- Kecamatan Rumat dalam Angka**, Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, *Regional Development Planning Board of Bengkalis Regency*, 2009
- Organisasi NGO Indonesia**, Pola Penyelesaian konflik dengan Kearifan Budaya Lokal *hermaninbismillah.blogspot.com/pola penyelesaian-konflik-dengan.htm*, tanggal download 13 oktober 2010
- Priyono, dkk, 2001**, Study Kualitas Sumberdaya Manusia, Puslitbang Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta
- Suhandy Siswoyo**, Identifikasi Potensi kawasan-KTM Tampo –Lore, <http://file.upi.edu/direktori/E-FPTK/JUR.PEND.TEKNIKARSITEKTUR/19731101200811>, tanggal download 15 Oktober 2010